

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PIDANA  
PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN  
PELECEHAN DI TRANSPORTASI ONLINE  
(Studi Kasus: Putusan Nomor 193/PID.B/2024.PN TPG)**

**Oleh  
Syarifah Balqis  
NIM. 2105040109**

**Abstrak**

Modernitas yang ditandai oleh perkembangan teknologi, industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi telah meningkatkan kompleksitas kehidupan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi individu dan kelompok, namun ketidakmampuan menyesuaikan diri sering memicu perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum dan moral sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan dan pelecehan seksual yang kian marak terjadi di ruang publik, termasuk sektor transportasi online, di mana tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban secara materiil tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang luas, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur bentuk-bentuk pencurian melalui Pasal 362, 363, 365, dan 367 serta perbuatan cabul dengan kekerasan dalam Pasal 289 KUHP yang secara normatif bertujuan menjaga ketertiban, keamanan, dan rasa keadilan dalam masyarakat, namun dalam praktiknya penegakan hukum sering dipandang belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang optimal bagi korban, khususnya perempuan sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi sasaran kekerasan seksual akibat kuatnya budaya patriarki dan lemahnya kontrol sosial, sebagaimana tercermin dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai percobaan pemerkosaan terhadap mitra pengemudi transportasi online Maxim di Tanjungpinang sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN.Tpg, yang memunculkan kritik publik terkait keadilan putusan dan keberpihakan terhadap korban, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pidana terhadap korban pencurian dalam keadaan memberatkan dan pelecehan seksual di transportasi online guna mendorong penegakan hukum yang lebih tegas, berperspektif korban, dan mampu menjamin rasa aman serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pencurian, Pelecehan

**CRIMINAL LAW PROTECTION FOR VICTIMS OF THEFT WITH  
AGGRAVATING CIRCUMSTANCES AND HARASSMENT  
IN ONLINE TRANSPORTATION  
(A CASE STUDY: DECISION NUMBER 193/PID.B/2024.PN TPG)**

**By  
Syarifah Balqis  
NIM: 2105040109**

***Abstract***

*Modernity, marked by the development of technology, industrialization, mechanization, and urbanization, has increased the complexity of social life, which requires individuals and groups to possess adaptive capacities; however, the inability to adjust to these dynamics often triggers deviant behavior that violates legal and moral norms, thereby giving rise to various social problems, particularly crimes of theft accompanied by violence and sexual harassment that increasingly occur in public spaces, including the online transportation sector, where such criminal acts not only cause material losses but also generate extensive psychological, social, and economic impacts on victims, while the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) has regulated forms of theft through Articles 362, 363, 365, and 367 as well as acts of indecency involving violence under Article 289, which normatively aim to maintain public order, security, and a sense of justice within society, yet in practice law enforcement is often perceived as failing to fully reflect optimal protection for victims, particularly women as a vulnerable group frequently targeted by sexual violence due to the persistence of patriarchal culture and weak social control, as reflected in the case of theft with violence accompanied by attempted rape against an online transportation partner of Maxim in Tanjungpinang as adjudicated in Decision Number 193/Pid.B/2024/PN.Tpg, which sparked public criticism regarding the fairness of the verdict and the degree of victim-oriented justice, thus this study aims to analyze criminal law protection for victims of aggravated theft and sexual harassment in online transportation in order to encourage stricter, victim-centered law enforcement capable of ensuring safety and justice in social life.*

*Keywords: Legal Protection, Theft, Harassment*